

Korupsi Bansos Provinsi Kalbar

PONTIANAK - Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW mengatakan penyelidikan kasus bantuan sosial Pemprov Kalbar mulai menemukan titik terang. Pihaknya sedang membidik calon tersangka. Namun penempatannya masih membutuhkan keterangan beberapa saksi. "Kita telah mengantongi calon tersangka. Semoga dalam waktu dekat bakal segera dapat ditetapkan," kata Suhadi.

Namun Suhadi enggan menjelaskan terlalu jauh. Dia belum merincikan identitas calon tersangka yang bakal ditetapkan polisi. Tetapi hanya menyebutkan pihaknya masih terus mengumpulkan keterangan saksi.

Saksi yang telah dimintai keterangan pihak kepolisian sebanyak 11 orang. Kasus bansos mulai kembali ditangani kepolisian sejak Januari 2011. Usai diserahkan secara resmi oleh KPK. Adapun saksi yang diperiksa meliputi empat dari Pemprov dan tujuh dari KONI Kalbar.

Saksi yang telah menjalani pemeriksaan yaitu Gus, Wal, Sun dan Mas. Mereka berempat saksi dari Staf Pemprov Kalbar. Sementara dari KONI antara lain, TA, RS, ED, HD, EA, SP, dan DM.

Laskar Anti Korupsi Indonesia mendesak Polda Kalbar segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bansos Provinsi Kalbar. Sebab kasus tersebut membutuhkan kepastian hukum yang jelas. Serta menginginkan pihak kepolisian mampu membongkar aktor intelektual penyelewengan dana bansos.

"Polda mestinya harus mampu menetapkan tersangka dengan segera. Penyelidikan kasus Bansos sudah terlalu lama berjalan. Polisi jangan hanya mampu memeriksa saksi. Padahal hasil audit investigasi temuan BPK telah KPK serahkan. Jadi tidak ada alasan bila kesulitan menetapkan tersangka. Polisi jangan terlalu lamban menangani kasus Bansos," kata ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah di Pontianak, kemarin.

Menurut dia kasus Bansos menjadi pertaruhan aparat kepolisian untuk mampu mengusut kasus dugaan korupsi. Serta memandang bila gagal menangani kasus tersebut berarti KPK memang mesti kembali turun tangan. Jika sampai terjadi tentu sangat disayangkan.

Kasus Bansos Kalbar pernah ditangani Polresta Pontianak. Kemudian diambil alih Polda sebelum KPK mengambil alih. Namun kasus itu kembali dilimpahkan kepada Polda Kalbar untuk mengusutnya. Selama mengusut kasus bansos, jajaran Polda telah memeriksa sembilan saksi. Sebelum kasusnya ditangani KPK. Kesembilan saksi yaitu Red, Gus, Wal, Mah, Is, Sya, Er, Tri, dan Sub.

Indikasi korupsi penggunaan bansos mulai muncul atas dasar hasil temuan audit BPK. Penggunaannya terindikasi merugikan negara senilai Rp22,14 miliar. Total dari APBD Kalbar tahun 2006 hingga 2008. Hasil telaah itu mencakup penggunaan keuangan daerah oleh DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009 terindikasi kerugian daerah Rp10,07 miliar.

Kedua, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara Koni kepada satgas prapon sebesar Rp1,368 miliar. Ketiga, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil

◆ Ke Halaman 23 kolom 5

Pontianak Post
Kamis, 10 Februari 2011

Polisi Kantongi Calon Tersangka

Polisi Kantongi Calon Tersangka ✓

Sambungan dari halaman 16

Bendahara KONI kepada satgas pelatda PON XVII sebesar

Rp8,59 miliar. Terakhir, ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. Khusus kasus

pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas prapon sebesar Rp1,368 miliar. (stm)